



Peran Pilar Demokrasi dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Tantangan Globalisasi

Zaky Umar Rachman

Program Studi: Kajian Ketahanan Nasional, Fakultas Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia, Indonesia

Email: zakyumarr@gmail.com

Abstract. *This research discusses the role of the pillars of democracy, namely the rule of law, community participation, and government transparency, in building Indonesia's national resilience in the era of globalisation. Using a qualitative approach based on literature analysis, this study finds that the rule of law supports social stability through the enforcement of justice, community participation strengthens government legitimacy, and transparency increases accountability and public trust. Global challenges such as economic dependency and radical ideologies require strengthening democracy through legal reform, political education, and administrative digitalisation. With this strategy, Indonesia can face the dynamics of globalisation while maintaining its national stability and sovereignty.*

Keywords: *democracy, national security, rule of law, globalisation*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran pilar-pilar demokrasi, yaitu supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan, dalam membangun ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur, penelitian ini menemukan bahwa supremasi hukum mendukung stabilitas sosial melalui penegakan keadilan, partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi pemerintah, dan transparansi meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik. Tantangan global seperti ketergantungan ekonomi dan ideologi radikal membutuhkan penguatan demokrasi melalui reformasi hukum, pendidikan politik, dan digitalisasi administrasi. Dengan strategi ini, Indonesia dapat menghadapi dinamika globalisasi sambil mempertahankan stabilitas nasional dan kedaulatannya.

Kata kunci: demokrasi, ketahanan nasional, supremasi hukum, globalisasi

1. PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah diterima secara luas di berbagai belahan dunia, mengutamakan kebebasan, partisipasi rakyat, dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Di Indonesia, demokrasi telah menjadi pilar utama yang tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga menjadi dasar bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menurut Rusdiarto (2017), demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi pada akhir abad ke-20, di mana perubahan ini membuka jalan bagi pemenuhan hak-hak politik masyarakat secara lebih luas, sekaligus menciptakan ruang bagi adanya kontrol terhadap kekuasaan negara.

Namun, di tengah upaya memperkuat pilar demokrasi, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa fenomena globalisasi yang terus berkembang. Globalisasi mengacu pada proses integrasi ekonomi, budaya, dan teknologi yang semakin meluas antarnegara dan masyarakat. Proses ini tidak hanya membawa dampak positif, seperti kemajuan teknologi dan

peningkatan perdagangan internasional, tetapi juga menimbulkan sejumlah tantangan serius yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas bangsa. Daryanto (2024) menjelaskan bahwa salah satu dampak negatif globalisasi adalah meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan eksternal, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial.

Tantangan-tantangan tersebut dapat memengaruhi stabilitas nasional dan ketahanan negara. Ketahanan nasional, yang mencakup berbagai aspek mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hingga keamanan, menjadi sangat penting untuk dipertahankan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Rosyad dan Ma`arif (2020) menekankan bahwa ketahanan nasional yang kuat sangat bergantung pada stabilitas politik dan sosial yang tercipta melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Oleh karena itu, pilar-pilar demokrasi, seperti supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintah, memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

Di sisi lain, globalisasi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap dinamika politik dalam negeri, terutama dalam hal demokrasi. Salah satu tantangan utama dalam era globalisasi adalah munculnya disinformasi yang dapat merusak kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Informasi yang cepat menyebar tanpa filter dapat memperburuk polarisasi politik dan memperlemah kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pilar-pilar demokrasi dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun ketahanan nasional yang kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pilar demokrasi dalam memperkuat ketahanan nasional di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia dapat menjadi fondasi untuk menciptakan ketahanan nasional yang kokoh, sehingga negara dapat tetap eksis dan berkembang di tengah arus globalisasi yang semakin pesat.

2. LANDASAN TEORI

1. Demokrasi dan Pilar-Pilar Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan arah negara melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil, serta mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan. Demokrasi bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial dan politik di masyarakat. Definisi demokrasi menurut Dahl (1989) mencakup lima elemen

utama, yaitu kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, kontrol atas keputusan pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak individu, pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan warga negara, dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dilaksanakan berdasarkan Pancasila, yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta penghormatan terhadap keberagaman dan keadilan sosial.

Pilar-pilar demokrasi terdiri dari beberapa aspek penting yang saling mendukung. Menurut Hurlock (2015), tiga pilar utama demokrasi adalah:

1. Supremasi Hukum – Hukum yang adil, tidak memihak, dan diterapkan dengan konsisten merupakan fondasi utama dalam menjaga kestabilan politik dan hukum di negara demokrasi. Supremasi hukum memastikan bahwa setiap individu dan lembaga, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku.
2. Partisipasi Masyarakat – Demokrasi menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses politik, termasuk pemilihan umum dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mencakup penyampaian aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Transparansi Pemerintahan – Transparansi menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Menurut Rachmiate (2013), transparansi dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

2. Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan konsep yang mencakup kemampuan bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dari berbagai ancaman yang dapat merusak integritas negara. Menurut Santoso dkk. (2023), ketahanan nasional terdiri dari dua dimensi utama, yaitu ketahanan fisik dan non-fisik. Dimensi fisik mencakup aspek pertahanan dan keamanan negara, sedangkan dimensi non-fisik mencakup ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan diplomasi. Kedua dimensi ini harus berfungsi secara seimbang agar negara dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan global maupun internal.

Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional harus dilihat dari sudut pandang integrasi berbagai pilar yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mencapai ketahanan nasional yang berkelanjutan, prinsip-prinsip demokrasi sangat penting, karena demokrasi memungkinkan terbentuknya iklim politik yang stabil dan

partisipatif, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi negara (Dhika dkk., 2022).

3. Globalisasi dan Implikasinya terhadap Demokrasi dan Ketahanan Nasional

Globalisasi merujuk pada proses interaksi dan integrasi yang semakin intens antara negara-negara di dunia dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Dikenal dengan istilah "global village", fenomena ini mengubah cara negara-negara berinteraksi dan saling memengaruhi. Salah satu dampak signifikan globalisasi adalah meningkatnya ketergantungan antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan, terutama ekonomi dan politik. Menurut Giddens (2000), globalisasi juga dapat menyebabkan homogenisasi budaya, yang dapat mengancam identitas lokal dan kedaulatan budaya suatu negara.

Dalam hal ini, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menjaga ketahanan nasionalnya di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Eka dkk. (2024) mengemukakan bahwa tantangan ini dapat memperlemah daya tawar Indonesia di forum internasional, jika tidak diimbangi dengan kebijakan dalam negeri yang kuat. Globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menurunkan stabilitas politik dan sosial. Untuk itu, peran pilar-pilar demokrasi sangat penting dalam membangun ketahanan nasional yang dapat menghadapi tantangan global tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam era globalisasi adalah disinformasi dan polarisasi yang terjadi akibat penyebaran informasi yang tidak terkontrol. Hal ini dapat mengancam stabilitas politik dan sosial suatu negara. Menurut Dwiyantri dkk. (2023), dalam konteks Indonesia, disinformasi dapat memperburuk ketegangan sosial, sehingga penting bagi negara untuk memastikan bahwa sistem demokrasi yang ada dapat mengelola informasi dengan baik dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam menjaga stabilitas nasional.

4. Strategi Membangun Ketahanan Nasional Berbasis Demokrasi

Membangun ketahanan nasional yang kuat di era globalisasi membutuhkan integrasi antara demokrasi dan kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika global. Menurut Widjojo (2016), beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pendidikan Kewarganegaraan – Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2. Penguatan Institusi Demokrasi – Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sangat penting untuk memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Sitorus (2020), penguatan ini juga meliputi pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi pemerintah.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan – Demokrasi yang efektif memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada hidup mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat ketahanan sosial.

3.METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama untuk menggali pemahaman tentang peran pilar-pilar demokrasi dalam membangun ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan. Penelitian ini juga menganalisis konsep-konsep utama dalam demokrasi, ketahanan nasional, serta dampak globalisasi terhadap kedua hal tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang diperoleh diorganisasikan dan dianalisis berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti supremasi hukum, partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah, dan strategi membangun ketahanan nasional. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pilar-pilar demokrasi dan ketahanan nasional dalam konteks tantangan globalisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana pilar-pilar demokrasi memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Pilar-pilar seperti supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan menjadi dasar yang tak tergantikan dalam menghadapi ancaman domestik dan internasional.

1. Supremasi Hukum sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Supremasi hukum adalah landasan utama demokrasi yang menjamin stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks ketahanan nasional, supremasi hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah konflik sosial dan memitigasi ancaman internal seperti separatisme dan radikalisme. Menurut Supriyadi dan Yustika (2020), supremasi hukum yang kuat

menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga mendorong stabilitas nasional yang lebih solid. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik, yang sering menjadi penghalang dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh.

Sebagai contoh, kurangnya penegakan hukum yang adil seringkali memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang berpotensi memicu ketegangan sosial (Setiadi, 2012). Oleh karena itu, reformasi hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hukum dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

2. Partisipasi Masyarakat dan Demokrasi Inklusif

Partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah tetapi juga memperkuat daya tahan negara terhadap ancaman eksternal. Wahyudi (2021) menekankan bahwa masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberlanjutan kebijakan publik. Namun, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia masih terhambat oleh rendahnya tingkat literasi politik, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini memerlukan intervensi melalui pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Partisipasi perempuan dalam politik juga menjadi indikator penting dari demokrasi yang sehat. Penelitian oleh Fadli (2017) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi dalam politik cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Di Indonesia, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik masih perlu didorong untuk memastikan demokrasi yang benar-benar inklusif.

3. Transparansi Pemerintahan sebagai Kunci Stabilitas

Transparansi pemerintahan merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah konflik sosial. Sebuah pemerintahan yang transparan cenderung lebih mampu menghadapi tantangan globalisasi karena memiliki dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Menurut Akbar dkk. (2024), transparansi adalah mekanisme yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, korupsi yang masih merajalela menjadi kendala utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan di Indonesia (Waluyo, 2022). Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui penguatan institusi pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga lainnya yang berfokus pada pemberantasan

korupsi. Dengan transparansi yang meningkat, Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman yang timbul akibat globalisasi, seperti ketergantungan ekonomi dan pengaruh politik asing.

4. Globalisasi dan Tantangan Ketahanan Nasional

Globalisasi membawa dampak besar terhadap ketahanan nasional, baik dalam bentuk peluang maupun ancaman. Farhas dan Riyanti (2022) menjelaskan bahwa globalisasi membuka pintu bagi aliran investasi dan teknologi asing, tetapi juga meningkatkan risiko ketergantungan terhadap negara-negara maju. Ketergantungan ini dapat menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara jika tidak dikelola dengan baik.

Di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan risiko penyebaran ideologi radikal yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik dalam negeri (Gunawijaya dan Utara, 2023). Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat pendidikan karakter dan nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda, agar mampu mempertahankan identitas bangsa di tengah arus globalisasi.

5. Strategi Penguatan Pilar Demokrasi di Era Globalisasi

Untuk menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia perlu mengintegrasikan pilar-pilar demokrasi ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Salah satu strategi utamanya adalah meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan ini penting untuk membentuk masyarakat yang kritis dan berdaya saing, yang mampu menghadapi pengaruh negatif dari globalisasi.

Selain itu, reformasi institusional juga diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Misalnya, penerapan teknologi digital dalam administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas birokrasi, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional (Sarjito, 2024).

5. KESIMPULAN

Pilar-pilar demokrasi seperti supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi. Supremasi hukum memastikan stabilitas sosial dan politik melalui penegakan keadilan, sedangkan partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi pemerintah dan memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Transparansi pemerintahan, di sisi lain, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, sehingga memperkuat daya tahan negara terhadap ancaman domestik maupun internasional. Di tengah tantangan globalisasi seperti ketergantungan ekonomi dan penyebaran ideologi radikal, penguatan demokrasi

melalui pendidikan politik, reformasi hukum, dan digitalisasi administrasi publik menjadi solusi strategis. Dengan implementasi yang konsisten dan komitmen dari semua pihak, Indonesia dapat memanfaatkan nilai-nilai demokrasi untuk menghadapi dinamika global, menjaga stabilitas nasional, serta mewujudkan kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. S., Iskandar, T., Prasetyo, M. A., Damayanti, T. O., Khomaidi, M. I., Abadi, M. D., & Renhard, R. (2024). Memperkuat ketahanan nasional: Aktualisasi bela negara melalui literasi digital. *Journal on Education*, 6(4), 18838-18849.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. New Haven: Yale University Press.
- Daryanto, E. (2024). Reaktualisasi ketahanan nasional: Sebuah kajian sejarah dan konseptual. *Jurnal Lemhannas RI*, 12. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i1.558>
- Dhika, R., & Waluyo, B., & Budyatmojo, W. (2022). Indonesia's national resilience in the era of digital democracy. *Proceedings of the International Conference on Democracy and Good Governance*. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-75-6_21
- Dwiyanti, D. A., Nurani, I., Alfarizi, M. N., & Hubbah, R. D. (2023). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik warga negara: Dampak positif dan negatif. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4). <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.34>
- Eka, E., Kurniati, K., Faujiah, Z., & Nurhasanah, N. (2024). Strategi bela negara untuk meningkatkan ketahanan nasional di era globalisasi. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3061-3067.
- Farhas, R. J., & Riyanti, R. (2022). Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 758-771.
- Fadli, Y. (2017). Islam, perempuan dan politik: Argumentasi keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia pasca reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 41-63.
- Giddens, A. (2000). *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. New York: Routledge.
- Gunawijaya, T., & Untara, I. M. G. S. (2023). Globalisasi dan ancamannya bagi ketahanan nasional dalam aspek ideologi. *Veda Jyotih: Jurnal Agama dan Sains*, 2(1), 119-128.
- Hurlock, E. B. (2015). *The psychology of democracy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Risdiarto, D. (2017). Kebijakan dan strategi pembangunan hukum dalam memperkuat ketahanan nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 177-193.
- Rosyad, A., & Ma'arif, M. (2020). Paradigma pendidikan demokrasi dan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 75-99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian ketahanan nasional melalui geopolitik dan geostrategi Indonesia abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 184-196. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.145>

- Setiadi, W. (2012). Pembangunan hukum dalam rangka peningkatan supremasi hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1–15.
- Supriyadi, R., & Yustika, A. (2020). Reformasi hukum di Indonesia: Jalan menuju ketahanan nasional. *Jurnal Hukum dan Ketahanan Nasional*, 25(3), 34–48.
- Wahyudi, S. (2021). Pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. *Jurnal Pendidikan dan Demokrasi*, 10(2), 56–68.
- Waluyo, B. (2022). Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjojo, A. (2016). Pemantapan nilai-nilai ideologi bangsa dalam rangka penguatan ketahanan nasional dalam aras global. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v2i1.489>